

Dampak Pencabutan Subsidi Pupuk Dan Antisipasi Polri

Oleh : Brigjenpol. Drs. Heru Susanto (Sahli Kapolri Bidang Sosek)

PENDAHULUAN

Sektor pertanian adalah merupakan sasaran prioritas dalam setiap rencana pembangunan lima tahunan yang dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia yang tentunya untuk keberhasilannya harus ditunjang pula oleh keberhasilan di sektor-sektor lain.

Menyadari betapa pentingnya keberhasilan dalam pembangunan di bidang sektor pertanian ini, maka untuk pencapaiannya pemerintah dengan melalui kebijakan-kebijakannya telah memberikan berbagai fasilitas subsidi pengadaan pupuk kepada para petani, dengan harapan dapat meningkatkan swasembada



pangan sehingga dapat dihemat cadangan devisa yang ada karena import pangan dapat ditekan.

Namun pada bulan Desember 1998, pemerintah telah mencabut subsidi pupuk yang selanjutnya harga pupuk akan disesuaikan dengan mekanisme pasar, sebagai dampak dari pencabutan subsidi pupuk tersebut ternyata telah menimbulkan keresahan di kalangan para petani bahkan telah di ekspresikan dengan tindakan-tindakan yang bersifat destruktif bahkan telah melanggar peraturan seperti penjarahan, pengrusakan dan lain-lain.

Tindakan-tindakan diatas tentunya harus segera diatasi dan diantisipasi oleh Polri, karena apabila dibiarkan terus berkembang akan mengganggu stabilitas Nasional yang pada gilirannya juga mempengaruhi keberhasilan Pembangunan Nasional itu sendiri.

FAKTA-FAKTA

1. Untuk tercapainya swasembada pangan, khususnya peningkatan produksi beras pemerintah telah memberikan subsidi pupuk kepada para petani sebesar 2,1 Triliyun Rupiah pertahun serta pengucuran KUT (Kredit Usaha Tani) sebagai modal produksi.
2. Sebagai realisasi pengaturan pemberian subsidi pupuk pemerintahpun telah membedakan antara subsidi yang diberikan kepada petani pangan dan petani perkebunan yaitu untuk harga pupuk bagi petani pangan sebesar Rp. 450,- perkilogram sedangkan bagi petani perkebunan harganya lebih mahal yaitu Rp. 1.250,- perkilogram.
3. Untuk menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan petani dalam musim

tanam, pemerintah telah memesan pupuk dari PT. Pusri dan PT. Petro Kimia Gresik, bahkan telah diproduksi melebihi target yaitu 110%, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang sebaliknya yaitu pupuk langka di pasaran.

4. Pemerintah secara mendadak telah mengeluarkan kebijaksanaan yaitu mencabut subsidi pupuk yang diperlakukan TMT 1 Desember 1998 dimana pada bulan-bulan itu adalah merupakan musim tanam bagi petani padi.
5. Dampak dari pencabutan subsidi, telah menimbulkan berbagai polemik di media massa serta menimbulkan keresahan petani, karena pupuk hilang dari pasaran, bahkan telah terjadi tindakan penjarahan terhadap gudang-gudang, toko-toko pupuk, angkutan pupuk yang mengganggu stabilitas keamanan.

ANALISIS/KAJIAN

6. Pencabutan subsidi pupuk oleh pemerintah yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Desember 1998, semata-mata didasarkan atas hasil evaluasi bahwa pemberian subsidi pupuk yang selama ini diberikan kepada para petani sebesar 2,1 Triliyun Rupiah dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi, karena fakta menunjukkan bahwa selama ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tidak dinikmati oleh petani tetapi dinikmati oleh pihak lain, sehingga kalau subsidi ini diberikan terus maka kerugian yang ditanggung pemerintah akan semakin besar.
7. Kalau memang alasan pencabutan subsidi hanya dilatar belakangi tidak sampainya

subsidi kepada para petani, maka rasanya kurang tepat kalau subsidi yang selama ini diberikan justru dicabut, tetapi solusinya adalah mencari jawaban mengapa subsidi tidak sampai kepada petani, dimana kebocorannya dan siapa pelakunya, itu yang harus ditangani, jadi bukan menghentikan subsidi pupuk yang sebenarnya tidak terlalu besar yaitu hanya 2,1 Triliyun jika dibandingkan dengan subsidi penyehatan perbankan sebesar 257 Triliyun.

8. Sahkan pencabutan subsidi pupuk jika diamati dari aspek ekonomi justru merugikan pemerintah karena :

a. Program swasembada pangan tidak tercapai, akibatnya pemerintah harus mengimport beras dari luar negeri yang harganya ditentukan dengan kurs dollar, padahal situasi Rupiah saat ini masih pada posisi lemah, sehingga membutuhkan dana yang besar untuk mencukupi stock pangan nasional.

b. Demikian halnya dengan rencana pemerintah untuk membuka L/C (Letter Of Credit), yang pada dasarnya memberi fasilitas kepada para importir untuk mendatangkan pupuk dari luar negeri, sehingga kelangkaan pupuk di pasaran dapat diatasi, inipun secara ekonomis juga tidak memecahkan masalah secara mendasar karena hanya berpengaruh terhadap kecukupan pupuk, sedangkan harganya juga sangat dipengaruhi kurs rupiah saat ini, jadi apalah artinya barang ada tetapi harganya tidak terjangkau oleh daya beli para petani.

9. Sedangkan jika dilihat dari aspek psikologis, pencabutan subsidi pupuk juga



Dampak dari pencabutan subsidi, telah menimbulkan berbagai polemik di

media massa serta menimbulkan keresahan petani, karena pupuk hilang dari pasaran, bahkan telah terjadi tindakan penjarahan terhadap gudang-gudang, toko-toko pupuk, angkutan pupuk yang mengganggu stabilitas keamanan.

telah menimbulkan keresahan di kalangan petani, hal ini disebabkan:

a. Petani telah cukup lama dan terbiasa menggunakan pupuk organik (kimia), sehingga untuk merubah kebiasaan ini tidak mudah dan memerlukan waktu untuk proses penyesuaiannya.

b. Para petani telah mampu memprediksi, bahwa dengan tanpa menggunakan pupuk organik, pada musim tanam hasil produksi yang diperoleh tidak optimal, dengan demikian mereka akan kesulitan untuk membayar KUT (Kredit Usaha Tani) yang telah diambil.

10. Sebagai akumulasi dari penghapusan subsidi pupuk yang baru saja diputuskan oleh pemerintah, pada kenyataannya telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang terjadi hampir di seluruh

penjuru tanah air antara lain berupa :

- a. Pupuk langka atau sulit diperoleh di pasaran.
 - b. Harga pupuk meningkat tajam, sebagai akibat tidak berimbang antara Supply and Demand.
 - c. Adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk demi keuntungan pribadi atau upaya penimbunan pupuk.
 - d. Terjadinya pemalsuan beberapa jenis pupuk di beberapa Propinsi (Sumut, Jateng, Jatim dan NTB).
 - e. Terjadinya kasus-kasus penjarahan di gudang-gudang, toko pengecer pupuk dan truck-truck pengangkut pupuk.
11. Kesemua kejadian seperti terurai diatas pada hakekatnya adalah merupakan dampak dari dihapusnya subsidi pupuk yang diputuskan oleh pemerintah secara tiba-tiba, padahal para petani saat itu sangat memerlukan pupuk, oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau situasi seperti itu menjadi pemicu terjadinya tindakan penjarahan, pengrusakan dan lain sebagainya di beberapa tempat, oleh karena agar kasus serupa tidak meluas di tempat-tempat lain, utamanya daerah yang menjadi sentra penghasil padi, perlu adanya tindakan antisipasi yang dilakukan oleh Polri.

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI POLRI

12. Bertitik tolak dari dampak yang timbul sebagai akibat dihapusnya subsidi pupuk oleh pemerintah, Polri dituntut untuk melaksanakan tugas ganda yaitu di satu sisi harus mengamankan kebijaksanaan

yang telah diambil oleh pemerintah, disisi lain juga harus bertindak secara proaktif untuk mengeliminir dampak yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak meluas ke tempat lain.

13. Langkah-langkah proaktif yang dilaksanakan oleh Polri dalam mengantisipasi dampak pencabutan pupuk adalah :

a. Peningkatan kegiatan deteksi dini.

Dalam kegiatan ini Polri secara intensif, melaksanakan tindakan penyelidikan yang diarahkan kepada :

- 1) Mekanisme produksi sampai dengan jalur distribusi pupuk.
- 2) Daerah-daerah yang di prediksi akan terjadi benturan-benturan sebagai akibat kelangkaan pupuk.

Sehingga dengan langkah-langkah penyelidikan secara intensif dapat dirumuskan sasaran, anatomi sasaran, cara bertindak yang tepat yang harus dilaksanakan oleh fungsi lain di lapangan.

b. Peningkatan kegiatan preemtif.

1) Polri melalui Babinkamtibmas secara terus menerus melaksanakan sosialisasi kebijaksanaan pemerintah tentang penghapusan subsidi pupuk kepada kelompok-kelompok tani di wilayah binaan masing-masing, sehingga dapat dicegah adanya kesalahan persepsi antara masyarakat petani dengan pemerintah.

2) Polri secara terpadu dengan instansi terkait, harus mampu meyakinkan kepada para petani bahwa penggunaan pupuk organik adalah bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan produksinya tetapi dapat ditempuh dengan cara

lain yaitu dengan mempergunakan pupuk anorganik.

c. Melaksanakan tindakan preventif.

Kegiatan yang bersifat pencegahan ini, dimaksudkan untuk memperkecil kesempatan/pejuang kelompok-kelompok tertentu yang akan melakukan tindakan-tindakan destruktif yang dapat diskripsikan dalam bentuk:

- 1) Peningkatan pengamanan jalur distribusi pupuk sampai ke tempat tujuan.
- 2) Melakukan kegiatan patroli yang diarahkan di lokasi-lokasi gudang pupuk, toko pengecer pupuk, maupun kendaraan pengangkut pupuk.
- 3) Melaksanakan kekuatan Dalmas yang cukup di daerah-daerah yang diperkirakan rawan terjadinya penjarahan.

d. Melaksanakan tindakan represif.

Tindakan represif yang dilaksanakan pada hakekatnya untuk memberikan efek determen terhadap pelaku, sehingga tidak diikuti dan meluas ke wilayah lain, ada-pun tindakan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melaksanakan Operasi Kepolisian yang diarahkan terhadap pelaku penyimpangan distribusi pupuk, penimbun pupuk dan pemalsu pupuk.
- 2) Melaksanakan penindakan secara tegas, sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku terhadap para penjarah pupuk.

PENUTUP

Esensi Hasil Kajian

- a. Latar belakang penghapusan subsidi pupuk oleh pemerintah, karena subsidi

yang selama ini diberikan tidak sampai kepada petani dan kalau diberikan terus akan merugikan pemerintah.

- b. Dampak dari penghapusan subsidi pupuk, mengakibatkan harga pupuk meningkat dan langka di pasaran, sehingga menimbulkan keresahan petani, yang di ekspresikan dalam bentuk penjarahan.
- c. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya tindakan-tindakan penjarahan yang dilakukan petani, Polri melaksanakan langkah-langkah proaktif yang diawali dengan melakukan deteksi dini, preemtif, preventif dan represif, yang dilaksanakan secara simultan.

Langkah tindak yang disarankan

- a. Menyadari bahwa penanganan masalah pupuk melibatkan banyak instansi, kiranya Polri perlu memberikan saran kepada pemerintah agar :
- 1) Pemberlakuan penghapusan subsidi pupuk, ditangguhkan sampai selesai musim tanam.
 - 2) Apabila penghapusan subsidi pupuk tetap diberlakukan kiranya pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani dalam bentuk :
 - a). Menaikkan harga jual gabah.
 - b). Memberikan kemudahan dalam pengucuran kredit KUT disertai bunga rendah.
- b. Untuk mencegah terjadinya situasi kontijensi yang dilatar belakangi kelangkaan pupuk di pasaran, kiranya Polri perlu melakukan koordinasi dan latihan gladi lapangan terpadu dengan Kesatuan samping yang ada wilayah masing-masing.